

Analisis pajak penerangan jalan dan pengaruhnya terhadap sektor listrik, gas, dan air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

***Nur Hakiki; Chandra Mustika; Zamzami**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*E-mail korespondensi: nurfajar8413@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the street lighting tax and its effect on the gas and water electricity sector in Tanjung Jabung Barat District. In addition, the authors identified the development and tax contribution of street lighting. Tanjung Jabung Barat Regency, the level of effectiveness of street lighting tax in tanjung jabung barat district and the influence of street lighting tax output on the electricity, gas and water sector in the West Tanjung Jabung Regency. This study used secondary data from the period 2006 to 2013. The data analysis method used in the study this is a descriptive quantitative method with regression analysis in interpolation data. In terms of its contribution to Regional Original Revenue

Keywords: PAD, Street lighting tax, electricity and gas sector

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pajak penerangan jalan dan pengaruhnya terhadap sektor listrik, gas, dan air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, penulis melakukan identifikasi Perkembangan dan kontribusi pajak penerangan jalan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tingkat efektifitas pajak penerangan jalan di kabupaten tanjung jabung barat dan pengaruh Output pajak penerangan jalan terhadap sektor listrik, gas dan air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari periode 2006 hingga 2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi dalam data interpolasi. Dari sisi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kata Kunci : PAD, Pajak Penerangan Jalan, Sektor listrik dan Gas

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggungjawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era-sentralistik. Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah.

Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana potensi pendapatan asli daerah (PAD). (Mardiasmo, 2009). Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. Menurut Lutfi (2004) pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Wibowo (2004) yang mengemukakan bahwa setelah era desentralisasi, pajak daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa merupakan pemberi kontribusi utama terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 45,6 persen. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34/2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28/2009. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak provinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu, Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea.

Target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan setiap tahun selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang. Jika dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah belum sesuai dengan potensi yang ada (Bachtiar, 2003). Melalui permasalahan tersebut maka diperlukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak penerangan jalan guna mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dalam penelitian ini untuk :1) Bagaimana Perkembangan dan kontribusi pajak penerangan jalan di kabupaten tanjung jabung barat, 2) Untuk mengetahui besar pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah, 3) Bagaimana pengaruh Output pajak penerangan jalan terhadap sektor listrik, gas dan air di KabupatenTanjungJabung Barat.

METODE

Data yang digunakan adalah data sekunder selama Delapan tahun dari tahun 2006-2013. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu, dari Instansi seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan perkembangan dan pendekatan kuantitatif dengan model regresi sederhana. Untuk menganalisis pengaruh Output pajak penerangan jalan terhadap sektor listrik, gas dan air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan model regresi sederhana :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana :

Y= sektor listrik, gas dan air

X₁= Pajak Penerangan Jalan

β₀ = Konstanta

β₁ = Koefesiensi Regresi

e = Error Term

Uji t Statistik

Untuk salah satu sampel dalam istilah ini biasanya disebut dengan one sample yang merupakan prosedur uji t untuk sampel tunggal, jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji t dipakai jika jumlah n sampel dibawah 30

Uji R²

Perbandingan Antara Variasi Y yang dijelaskan oleh X₁ dan X₂ secara bersama-sama dibandingkan dengan variasi total Y. Jika selain X₁ dan X₂, semua variabel ini diluar model yang diwadahi dalam E dimasukkan ke model R² akan bernilai 1. Hal ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pajak penerangan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Upaya Pemerintah Sumber penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung dengan menghitung perkembangan pajak penerangan jalan itu sendiri. Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat perkembangan pajak penerangan jalan dari tahun 2006 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan dengan rata-rata 40, 67 persen pertahunnya. Pada tahun 2007 penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 1.324,71 juta rupiah dan pada tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan menurun hanya sebesar 825,19 juta rupiah dengan perkembangan sekitar -37,71 persen, tahun 2009 penerimaan pajak penerangan jalan meningkat menjadi 1.208,08 juta rupiah dengan perkembangan mencapai 46,40 persen. Kemudian pada Tahun 2010 penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 1.529,69 juta rupiah dengan perkembangan sebesar 26,62 persen. Pada tahun 2011 pajak penerangan jalan kembali meningkat sebesar 1.962,73 juta rupiah dengan perkembangan 28,31 Persen. Pada tahun 2012 penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup besar sekitar 3.187,08 juta rupiah dengan perkembangan sebesar 62,38, dan pada Tahun 2013 mengalami kenaikan yang sangat tajam dan puncaknya yaitu sebesar 8.794,92 juta rupiah dengan perkembangan mencapai 175,96 persen. Pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2008.

Tabel 1. Perkembangan pajak penerangan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan %
2006	1.073,49	-
2007	1.324,71	23,40
2008	825,19	-37,71
2009	1.208,08	46,40
2010	1.529,69	26,62
2011	1.962,73	28,31
2012	3.187,08	62,38
2013	8.794,92	175,96
Rata- rata	2488,23	40,67

Sumber : *Dipenda dan Tanjung Jabung Dalam Angka Tahun 2006-2013 (diolah)*

Peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan ini dikarenakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terus berkembang dengan banyaknya pembangunan rumah, ruko dan lain sebagainya, sehingga perkiraan penetapan potensi penerimaan pajak penerangan jalan bisa semakin meningkat. Adapun upaya yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan ini diantaranya dengan cara melakukan koordinasi dengan PT. PLN (persero) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola pajak penerangan jalan, agar Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mengetahui besarnya potensi riil dari pajak penerangan jalan yang dimiliki, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target serta dengan tetap meningkatkan potensi penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya.

Kontribusi pajak penerangan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2006-2013

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak penerangan jalan. Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2006 sampai dengan 2013 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006 kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,77 persen, dan pada tahun 2007 menurun menjadi 5,14 Persen, sedangkan pada tahun 2008 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 3,38 persen . Pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 5,08 persen, tahun 2010 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan sebesar 6,50 persen, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan lagi sebesar 4,46 persen dan pada tahun 2012 kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 6,04 persen, kemudian pada tahun 2013 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan yang sangat besar sebesar 13,84 persen dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 6,28 persen.

Tabel 2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2013

Tahun	Realisasi PPJ (Juta Rupiah)	Realisasi PAD (Juta Rupiah)	Kontribusi %
2006	1.073,49	18.620,38	5,77

2007	1.324,71	25.774,30	5,14
2008	825,19	24.430,18	3,38
2009	1.208,08	23.778,19	5,08
2010	1.529,69	23.536,95	6,50
2011	1.962,73	44.011,89	4,46
2012	3.187,08	52.776,25	6,04
2013	8.794,92	63.545,46	13,84
Rata- Rata Kontribusi			6,28

Sumber: Dispenda Kab. Tanjab Barat Tahun 2006-2013 (Data diolah)

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup meningkat dikarenakan mulai tingginya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari sisi penerimaan, pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan terbesar dalam sumber-sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun kebijakan yang dapat diambil pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan menambah penerangan jalan, melakukan perawatan penerangan jalan, memelihara dan memperbaiki penerangan jalan yang rusak. Sehingga penerangan jalan dapat terus ditingkatkan, yang akhirnya akan menambah penerimaan dari pajak penerangan jalan tersebut, dan secara otomatis akan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2006-2013

Efektifitas Target Pajak Penerangan Jalan yang dimaksud disini adalah seberapa jauh tercapainya Realisasi Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat tingkat efektifitas Ppj dari tahun 2006 sampai tahun 2013 mengalami naik turun, pada tahun 2006 tingkat efektifitasnya sangat tidak efektif sebesar 33,98 persen kurang dari 100 persen. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan target pajak penerangan jalan yang harus diraih pada tahun 2006 sebesar 3.159,00 juta rupiah dan realisasinya sebesar 1.073,49 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2007 pemerintah menaikkan target pajak penerangan jalan yang harus dicapai karena pemerintah menganggap pada tahun tersebut bisa melebihi pada tahun sebelumnya. Realisasi yang didapat pada tahun 2007 sebesar 1.324,71 juta rupiah dan mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya dengan tingkat efektifitas mencapai 39,25 persen yang tergolong masih tidak efektif. Pada tahun 2008 tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kurang efektif, skala persentasinya sebesar 68,77 persen disebabkan karena pemerintah menurunkan target yang dicapai sebesar 1.200,00 juta rupiah dan realisasinya sebesar 825,19 juta rupiah, ini disebabkan karena penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih asing tentang pengetahuan pajak penerangan jalan. Tahun 2009 kembali menurunkan target sebesar 1.100,00 juta rupiah dan realisasinya sebesar 1.208,08 juta rupiah dengan tingkat efektifitasnya 109,83 persen, termasuk kategori sangat efektif. Pada tahun ini penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mulai sedikit demi sedikit memahami kesadaran membayar pajak. Tahun 2010 tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali sangat efektif dengan skala persentasinya 135,97 persen karena pemerintah menaikkan target

yang harus dicapai pada tahun sebelumnya, target tahun 2010 sebesar 1.125,00 juta rupiah dan realisasinya ditetapkan sebesar 1.529,69 juta rupiah.

Tabel 3. Efektifitas pajak penerangan Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2006-2013

Tahun	Target PPJ (Juta Rupiah)	Realisasi Ppj (Juta Rupiah)	Efektifitas %	Katagori
2006	3.159,00	1.073,49	33,98	Tidak Efektif
2007	3.374,99	1.324,71	39,25	Tidak Efektif
2008	1.200,00	825,19	68,77	Kurang Efektif
2009	1.100,00	1.208,08	109,83	Sangat efektif
2010	1.125,00	1.529,69	135,97	Sangat efektif
2011	1.225,00	1.962,73	160,22	Sangat efektif
2012	1.505,00	3.187,08	211,77	Sangat efektif
2013	8.794,92	8.794,92	100	Efektif
Rata-rata efektifitas			107,47	Sangat efektif

Sumber : DISPENDA Kab. Tanjab Barat Tahun 2006-2013 (Data Diolah)

Sementara itu, pada tahun 2011 tingkat efektifitas pajak penerangan jalan sangat efektif karena pemerintah menaikkan sedikit target dan realisasinya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya naik dari 135,97 persen menjadi 160,22 persen, dikarenakan naiknya target pajak penerangan jalan sebesar 1.225,00 juta rupiah. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 1.505,00 juta rupiah dan teralisasi sebesar 3.187,08 juta rupiah atau sebesar 211,77 persen, ini dikatakan sangat efektif dikarenakan ada sosialisasi oleh petugas penagih pajak. Kemudian, pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menaikkan target sebesar 8.794,92 juta rupiah dan terealisasi sebesar 8.794,92 juta rupiah atau sebesar 100 persen, ini dikatakan penurunan walaupun masih dikatakan efektif yang disebabkan dengan adanya penurunan pendapatan masyarakat umumnya.

Berdasarkan rasio efektifitasnya, semakin tinggi persentasinya menggambarkan kemampuan daerah semakin membaik. Dilihat dari tahun 2006 tingkat persentasinya sebesar 33,98 persen, tahun 2007 39,25 persen, tahun 2008 68,77 persen, tahun 2009 109,83, tahun 2010 135,97, tahun 2011 160,22 persen, tahun 2012 sebesar 211,77 persen, tahun 2013 sebesar 100 persen. Dari tingkat persentasinya tersebut bersifat fluktuatif dengan rata-rata efektifitas diatas 100%. Hal ini berarti bahwa kemampuan daerahnya mencapai tujuan yang semakin baik karena penerimaan dari pajak penerangan jalan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat efektif. Model regresi Sederhana dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil regresi sederhana

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9171.543	700.1883	13.09868	0.0000
X1	0.856038	0.199295	4.295337	0.0051

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan persamaan diatas maka secara umum persamaan diatas:

$$Y = 9171.543 + 0.856038X + e$$

Berdasarkan hasil model estimasi tersebut dapat dibuat suatu interpretasi:

Nilai konstanta dari hasil regresi adalah 9171.543. Hal ini dapat diartikan bahwa jika tidak ada perubahan pada pajak penerangan jalan, maka nilai sektor listrik, gas dan air meningkat sebesar 9171.543 juta rupiah.

Pajak Penerangan Jalan (X_1)

Variabel pajak penerangan jalan (X_1) mempunyai pengaruh positif terhadap sektor listrik, gas dan air (Y). Besarnya koefisien pajak penerangan jalan menunjukkan besarnya pengaruh pajak penerangan jalan terhadap sektor listrik, gas dan air. Pada kurun waktu 2006-2013, nilai koefisien regresi dari pajak penerangan jalan sebesar 0.856038, jika variabel lainnya dianggap konstan berarti apabila pajak penerangan jalan meningkat 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan sektor listrik, gas dan air sebesar 856038 juta rupiah.

Uji t statistik

Uji t statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel PPJ mempunyai pengaruh terhadap sektor listrik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada $\alpha = 5\%$, $df = 6$. Nilai $t_{(0.05 \times 6)} = 1.943$. Dari hasil output menunjukkan bahwa PPJ mempunyai angka yang signifikan dengan probabilitas dibawah 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu sebesar 0,0051, dengan nilai t-hitung (4.295337) > t-tabel (1.943). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara PPJ terhadap sektor listrik pada tingkat sigifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%.

Koefisien determinasi (Uji R^2)

Dari hasil output diperoleh nilai R-Square sebesar 0.75. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh PPJ terhadap sektor listrik selama kurun waktu 2006-2013 sebesar 75 persen, sedangkan sisanya sebesar 25 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil evaluasi analisis serta pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Analisis Pajak Penerangan Jalan Dan Pengaruhnya Terhadap Output sektor Listrik, gas dan Air Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2006-2013 sebagai berikut:

Rata-rata perkembangan pajak penerangan jalan periode 2006-2013 mencapai 40,67 persen dengan perkembangan tertinggi pada tahun 2013 mencapai 175,96 persen dan perkembangan terendah pada tahun 2008 mencapai -37,71 persen. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan periode 2006-2013 mencapai 6,28 persen dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2013 mencapai 13,84 persen dan kontribusi terendah pada tahun 2008 mencapai 3,38 persen. Rata-rata efektifitas pajak penerangan jalan periode 2006-2013 mencapai 107,47 persen dengan tingkat efektifitas paling besar terjadi pada tahun 2012 mencapai 211,77 persen dan tingkat efektifitas terendah di tahun 2006 mencapai 33,98 persen. Berdasarkan rata-rata efektifitas selama periode 2006-2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah efektif.

Saran

Mendata kembali jumlah penerangan jalan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini meningkatkan jumlah dari penerimaan pajak penerangan jalan serta mengurangi penerangan jalan atau penggunaan listrik secara ilegal. Menambah dan memperluas penerangan jalan, memelihara dan memperbaiki penerangan jalan yang rusak serta perawatan penerangan jalan. Selain itu, melakukan observasi langsung upaya untuk memberikan informasi yang lengkap tentang peraturan perpajakan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta dicari metode sosialisasi yang kondusif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mengawasi proses pelaksanaan dari Pajak Penerangan Jalan agar dapat mengatasi permasalahan yang akan timbul. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan Keuangan publik, tarif pajak kondusif yang tak perlu membebani masyarakat. Sosialisasi pentingnya pembayaran tepat waktu akan penerangan jalan sehingga tidak terjadi tunggakan yang berdampak terhadap penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan pembayaran atau tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Dan memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara mendistribusikan listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau daerah yang berada dalam tahap pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2001). *Tanjab Barat Dalam Angka*. Berbagai tahun terbitan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Imam, Bachtiar. (2003). “*Optimalisasi Penarikan Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*”. *Tesis S2 Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Indra, Riady. (2010). *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Intan, Dwi Lestari. (2017). “*Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012-2015*”.
- Lutfi, Achmad. (2004). *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 oleh Pemda untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Studi di Kota Bogor: Bogor*
- Mardiasmo.(2006). *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta
- Monginsidi S.M Riedel. (2013). *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelolaan Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Metode Kuantitatif*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- _____.(2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga: Jakarta

Kuncoro, Mudrajat.(1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.